

# OPOSISI ATAU KEDEWASAAN<sup>1</sup>

Oleh Nurcholish Madjid

“Saya optimis,” kata Dr. Nurcholish Madjid, ahli filsafat Islam dan pendiri Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, ketika menyampaikan pandangannya tentang prospek umat Islam di Indonesia kepada wartawan *TEMPO*, Wahyu Muryadi dan Priyono B. Sumbogo. Ia juga memaparkan perihal kerukunan antar-pemeluk agama sebagai satu keharusan dalam konstelasi kehidupan beragama.

**Wajah Islam menjelang 1991, makin manis, terutama terhadap pemerintah. Bahkan, akhirnya lahir Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang didukung sejumlah pejabat. Komentar Anda?**

Soal wajah umat Islam manis, itu resiprokal — hasil proses dua belah pihak. Kualitas dan fungsi umat Islam yang seperti itu berkaitan dengan meningkatnya pendidikan. ICMI pun harus kita baca dalam kerangka itu.

Selama ini umat Islam merupakan kelompok yang relatif vokal. Ada lembaga seperti masjid. Maka, dari dulu suara yang diwakili para ulama nyaring terdengar. Ajaran agama memberikan pedoman

---

<sup>1</sup> Majalah *TEMPO*, “Oposisi Atau Kedewasaan”, No. 44/20, 29 Desember 1990. Pewawancara Wahyu Muryadi dan Priyono B. Sumbogo.

normatif, maka suara mereka selalu bernada normatif. Yaitu nada apa yang seharusnya.

Dengan sendirinya selalu ada jarak dengan kenyataan yang berjalan menurut apa yang mungkin. Adanya jarak itu mengesankan sikap oposisi terhadap pemerintah. Pernah ada adagium yang mengatakan ulama yang paling jahat adalah ulama yang datang kepada pemerintah.

Itu sama dengan sikap kaum intelektual, yang juga bicara apa yang seharusnya. Intelektual di Amerika, ya, kekiri-kirian. Di Eropa Timur, kekanan-kananan. Ada *gap* dengan kenyataan. Ini tak bakal berubah.

Sekarang, intelektual Islam yang *notabene* berpendidikan modern Barat memperhitungkan fakta-fakta hingga cara berpikirnya tidak semata-mata normatif tetapi juga *scientific*. Mereka tahu cara sehingga mereka itu disebut cendekiawan.

Tidak usah sembunyi-sembunyi, cendekiawan yang berkumpul di Malang itu 90% berpendidikan Barat. Baik Barat yang ada di Indonesia maupun yang di Barat sana. Maka, ada kombinasi. Jadi, ICMI harus dilihat sebagai gejala menutup kesenjangan antara yang seharusnya dan apa yang mungkin. Inilah optimisme saya.

Dalam lima sampai sepuluh tahun akan terasa kematangan dan kedewasaan yang menaik. Misalnya, kehendak terhadap pemerintah. Taruhlah, pemerintah harus adil. Dahulu, keinginan itu hanya slogan. Kelak bisa disertai tindakan, usul, atau konsep mengenai masalah keadilan itu.

**Munculnya ICMI, apa bukan bukti umat Islam makin kompromistis terhadap pemerintah?**

Orang seperti Amien Rais atau Watik Pratiknya, yang selama ini dikenal oposan dan sekarang ikut ICMI, saya tak mengenal itu kompromi. Itu adalah kedewasaan. Oposisi berbeda dengan *oppositionalism*. Oposisi adalah suatu tugas, dalam arti loyal pada

pemerintah. Bila pemerintah tidak benar, mereka ingatkan. Ini yang disebut amar makruf nahi munkar.

Umat Islam, karena beberapa pengalaman politik di masa lalu — sebagian karena kesalahan sendiri, sebagian yang lain karena konspirasi dengan luar — menghasilkan pengalaman politik yang negatif. Itu berlarut jadi *sindrom oppositionalism*. Misalnya, kasus Warman dan Tanjungpriok bisa dimasukkan ke dalamnya. Ini karena sebagian besar orang Indonesia itu umat Islam.

Namun, kalau sebagian besar orang Indonesia adalah Katolik, ya umat Katolik yang begitu. Contohnya di Filipina. Yang memimpin New People's Army para pastor. Di Burma, yang sebagian besar rakyatnya menganut Budha, yang memimpin perlawanan terhadap Ne Win, ya para biksu. Bentuk *oppositonalism* muncul karena pesimisme. Karena merasa tak didengar, lalu mereka berteriak.

**Apakah sekarang umat Islam sudah memperlihatkan sikap oposisi loyal?**

Itu masih harapan. Kalau diakui eksistensinya, misalnya, wadah ICMI, orang akan makin berpikir positif. Orang-orang ini punya ide sendiri mengenai negara. Inilah kegunaan terbesar dari adanya ICMI.

**Apa misalnya Muhammadiyah atau NU belum memperlihatkan sikap itu?**

Secara perorangan sudah. Tapi, secara kelembagaan belum. Kini banyak jenderal dan pejabat punya latar Muhammadiyah. Sebab, organisasi ini memiliki tradisi tak terjun dalam politik praktis. Jadi, berkurang dinding antara pemerintah dan Muhammadiyah. Maka, orang mudah masuk ke jajaran birokrasi.

Sebaliknya dengan NU. Pernah sebagai partai politik, maka dinding itu kuat sekali. NU pergi dari ekstrem ke ekstrem. NU pernah *walk out* dari sidang DPR (1982). Tapi saya belum pernah

mendengar ada jenderal yang berasal dari NU. Setelah kembali ke *khittah*, tampaknya NU sudah memperbaiki diri.

Oposisi loyal harus partai. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) harus tegas fungsinya. Seandainya saya pemimpin salah satunya, ketua umum pada tiap pemilu harus mencalonkan diri sebagai presiden. Jangan belum-belum sudah butek, atau kebulatan tekad. Memang, jangan mengharapkan menang.

Yang penting mendidik rakyat menyediakan alternatif. Kalau tidak begitu, itu yang namanya kompromistis. Ismail Hasan Metareum, misalnya, harus tegas. “Sayalah calon presiden dari PPP”. Begitu. Atau kalau dia merasa tak sanggup, cari calon lain dari PPP. Pokoknya, memberikan alternatif pada rakyat untuk memilih. Dan pemerintah harus memberi kesempatan itu pada rakyat.

### **Apakah karena selama ini tidak ada suasana yang kondusif?**

Ya. Dulu memang pada 1965-1966 masih rawan. Maka tercipta suasana seperti itu. Tapi seharusnya tidak menjadi pandangan politik permanen. Sekarang sedikit demi sedikit pemerintah membuka kemungkinan itu. Buktinya, orang diberi kesempatan memberikan tafsiran terhadap Pancasila, asal bertanggung jawab.

### **Sikap pemerintah yang elastis itu, apa sudah saatnya?**

Memang kita tidak menghendaki grafik terjal. Saya setuju landai saja, asal terus naik. Kita harus mendorong proses demokrasi itu sesuai dengan bidang kita masing-masing. Menurut saya, momen pemilu nanti harus digunakan untuk merintis secara substantif proses demokratisasi ini.

Berkenaan dengan pemilu, partai-partai itu harus jelas, berani atau tidak tampil sebagai alternatif. Tak usah dengan retorika bombastis — itu indikasi tidak dewasa. Tapi dengan tenang menyatakan, sebetulnya negara kita setelah sekian lama membangun

adalah itu, dan konsep kami adalah ini. Dan itu kami yang laksanakan. Mestinya begitu.

### **Mengapa keberanian partai-partai menampilkan diri kurang mencuat ke permukaan?**

Saya takut, seperti dibilang Bung Hatta: zaman besar ketemu orang kecil. Momennya besar tapi orangnya kecil. Tidak berani menangkap momen.

### **Sikap umat Islam memanfaatkan momentum itu?**

Sebaiknya umat Islam lebih dewasa. Artinya, dukung siapa saja yang mau didukung. Contohnya, sewaktu Musda Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Bengkulu. Karena di situ banyak yang Golkar dan PPP, saya lihat *kok* tak ada yang PDI. Maka, saya bilang, mungkin kita perlu mencari *volunteer* masuk PDI.

### **Kemudian, PPP yang mengklaim sebagai partai Islam?**

Saya berharap PPP jangan mempersempit dirinya hanya dengan mengklaim sebagai partai orang Islam. Sebab, sekarang orang lebih banyak memperhatikan apa yang dia mau dari segi politik. Jangan hanya mengandalkan simbol.

### **Kita beralih. Belakangan ini kerukunan antara pemeluk agama kembali jadi isu. Pandangan Anda?**

Itulah. Saya bilang berkali-kali, kenapa saya marah. (Seraya menarik napas panjang). Saya ada hak sedikit untuk mengakui bahwa saya telah berbuat untuk mengembangkan toleransi itu. Tiba-tiba Arswendo mengganggu dengan *guyon* begitu saja. Saya merasa disepelekan betul. Sebab, teman-teman saya, yang selama

ini tidak setuju dengan istilah toleransi dan sebagainya itu, akan dengan gampang mengatakan: Nah, betul kan, Cak Nur, bahwa mereka kayak gitu itu. Masa begitu *kok* ditolerir.

Jadi, itu namanya menarik karpet dari bawah meja Anda. Meja Anda terguling, *you pull the carpet from under my table*. Saya bilang begitu pada Jakob Oetama (Pemimpin Redaksi Kompas — *ed.*). Jadi, marah saya bukan karena umat, begitu. Saya ini sudah capek disalahpahami, difitnah, dan sebagainya karena mengembangkan toleransi. Tapi Arswendo sudah mengganggu secara tidak bertanggung jawab. Tolong ini disebut.

Jadi, bukan sikap saya itu akomodasi kepada umat. Paramadina itu waktu berdiri, macam-macam datang reaksi. Difitnah seolah sudah digunakan oleh orang Kristen dan sebagainya, karena kita selalu mengajukan argumen untuk toleransi.

Ini berat. Sebab, ada landasan teologisnya. Dan itu kita kembangkan, sampai-sampai orang semacam John L. Esposito ke sini mencari artikel-artikel saya untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tiba-tiba oleh Arswendo dibeginikan saja dengan *guyon*, karena ingin oplahnya naik. Bagaimana kita nggak marah. Tapi dengan pemerintah bertindak tegas, orang mulai positif lagi.

Negara ini mayoritasnya umat Islam. Karena itu, kerukunan beragama jauh lebih terjamin daripada kalau terbalik. Lihat saja di mana-mana. Orang boleh mengatakan sebagai retorika politik bahwa berkat Pancasila kita toleran. Namun, secara substansi adalah berkat Islam kita toleran. [❖]